

## Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kantor Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

Maria Paskalia Dua Vina<sup>1</sup>, Henrikus Herdi<sup>2</sup>, Pipiet Niken Aurelia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Nusa Nipa

**Abstract.** *This study aims to determine the effectiveness and efficiency of the Regional Revenue and Expenditure Budget at the Tourism and Culture Office of Sikka Regency in the 2019 – 2021 budget period. expenditure and income in each existing organization. The method used in this research is descriptive qualitative analysis. Data collection techniques in the form of Observation, Interview, and Documentation. The research results for the level of effectiveness of budget implementation in 2019-2021 are overall quite effective and the level of efficiency in 2019-2021 is overall inefficient, while the growth rate has also experienced increases and decreases. The Sikka Regency Tourism and Culture Office should pay attention to the situation and conditions, so that the budget that has been prepared can be realized properly.*

**Keywords:** Budget, Expenditure Growth, Government, APBD.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka pada periode anggaran tahun 2019 – 2021 dengan demikian, hal ini sangat penting bagi suatu organisasi agar mengalokasikan anggarannya dengan baik dan tentunya memiliki keterkaitan dengan faktor anggaran belanja dan pendapatan pada setiap organisasi yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian untuk tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2019 – 2021 keseluruhannya cukup efektif dan tingkat efisiensi pada tahun 2019 – 2021 keseluruhannya tidak efisien, sedangkan tingkat pertumbuhan juga mengalami kenaikan dan penurunan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi, agar anggaran yang sudah disusun dapat direalisasikan dengan baik.

**Kata kunci:** Anggaran, Pertumbuhan Belanja, Pemerintah, APBD.

### LATAR BELAKANG

Menurut Firmansyah (2018), Pengaturan pada aspek perencanaan diharapkan agar Seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga bisa menciptakan ekonomis, efektif, dan efisien dalam menggunakan belanja daerah dengan *output* dan *income* yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparansi kepada masyarakat luas. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak terukur secara jelas jumlah yang dikeluarkan, hanya sebatas pada penambahan dan pengurangan anggaran berdasarkan anggaran pada tahun sebelumnya dan tidak adanya standar biaya yang jelas menyebabkan anggaran biaya ini kurang objektif dan rawan dimanipulasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dien *et al.*,(2015) mengemukakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap efektif dan efisien penggunaan anggaran

keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif dan efisiennya pengguna anggaran dan belanja daerah maka kinerja keuangan daerah pun semakin tinggi peningkatan kinerjanya. Sedangkan peneliti yang lain menemukan bahwa kinerja pendapatan belum efektif hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang dianggarkan. Adapun kinerja belanja pada pemerintah daerah sudah efektif hal ini didukung dengan kecilnya anggaran belanja terealisasi dari yang telah dianggarkan. Sehingga pemerintah daerah harus melakukan penghematan dan melakukan peningkatan PAD dan disertai dengan penghematan belanja (Daling, 2013:82).

Laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena pada dasarnya laporan keuangan daerah adalah bagian dari Sistem Keuangan Negara. Yang setiap tahun tidak selamanya anggaran yang direalisasikan mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Sebagaimana peneliti Tenda M.V.S., *et al.* (2014:638) menemukan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak terjadi penurunan dan kenaikan yang signifikan, khususnya pada belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja infrastruktur, jalan dan imigrasi. Terjadi kelebihan karena anggaran yang diterima lebih besar daripada anggaran realisasi. Sebaiknya kepala daerah meningkatkan dari realisasi anggaran belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah yang dikelolanya.

Menurut Chairil (2017), Pelaksanaan anggaran adalah tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik secara logis maupun kronologis. Walaupun demikian proses pelaksanaannya menjadi tidak sederhana karena adanya mekanisme yang menjamin ketaatan pada program pendahuluan. Bahkan dengan perkiraan yang baik sekalipun, akan ada perubahan-perubahan yang tidak terduga dalam tahun yang bersangkutan yang diperlihatkan dalam anggaran. Tentu saja perubahan-perubahan tersebut harus disesuaikan dengan cara yang konsisten dengan tujuan yang mendasar untuk menghindari terganggunya aktivitas program/kegiatannya. Pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien dan efektif maka system penganggaran dirubah menjadi sistem anggaran kinerja. Dengan menggunakan anggaran kinerja tersebut maka anggaran daerah akan lebih transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja diperlukan tolak ukur kinerja setiap unit kinerja yang kemudian diterjemahkan melalui berbagai program dan kegiatan yang dapat ditentukan satuan ukur.

## KAJIAN TEORITIS

### **Teori *Stewardship***

Teori dalam penelitian ini adalah bagian dari adalah *agency theory* yaitu *Stewardship* yaitu *Stewardship theory* yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama untuk kepentingan organisasi.

Menurut David (2010), Teori tersebut mengansumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas atau usaha untuk mencapai tingkat kepuasan tertinggi kelompok. *Stewardship theory* dapat diterapkan pada penelitian Akuntansi Sektor Publik seperti organisasi pemerintahan yang sejak awal perkembangannya, Akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *steward* (pihak yang bertanggungjawab dalam sebuah organisasi) dan *principal* (pimpinan atau pihak yang memberi kewenangan). Akuntansi sebagai penggerak berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan adanya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik.

### **Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Pengertian akuntansi sektor publik Menurut Renyowijoyo, (2012:1) “Akuntansi Sektor Publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik”. Sekarang terdapat perhatian yang makin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non pemerintahan. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

### **Tujuan Akuntansi Sektor Publik**

Berikut, tujuan akuntansi sektor publik menurut Hasanah, (2017) yaitu:

1. *Management Control* (control manajemen)

Yaitu sebagai pengendalian manajemen, yang mana akuntansi sektor publik akan memberikan informasi yang dibutuhkan lembaga publik dalam pengelolaan secara tepat dan efisien, juga memberikan informasi penggunaan sumber daya yang sudah dianggarkan dalam lembaga publik.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Tujuan akuntansi sektor publik yang selanjutnya berhubungan dengan akuntabilitas. Jadi, akuntansi sektor publik ini akan memberikan informasi penting yang dibutuhkan oleh pimpinan lembaga publik. Informasi ini nantinya digunakan pimpinan sebagai laporan

pertanggungjawaban Seluruh bidang dibawah kewenangannya. Bukan hanya itu, informasi ini juga digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada public atas kinerja yang dilakukan lembaga pemerintahan. Jadi, publik dapat melihat transparansi tentang seperti apa penggunaan anggaran publik oleh lembaga pemerintah.

### **Pengertian Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan, bidang keuangan Negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi non profit lainnya. Fungsi akuntansi pemerintahan adalah menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat meliputi aspek kepengurusan administrasi pemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Mentu dan Sondakh, 2016).

### **Tujuan Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Fauzi (2017:2), Pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik memiliki tujuan umum untuk menyejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut rakyat membuat aturan umum yang harus dipenuhi pemerintah berupa konstitusi atau undang-undang lainnya. Oleh karena itu, adanya perbedaan perlakuan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi bisnis dalam hal tujuan serta pengukuran kinerjanya. Meskipun tujuan kedua organisasi itu berbeda tetapi pada hakikatnya tujuan akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis sama, yaitu memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi tersebut.

### **Karakteristik Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Fauzi (2017:3), karakteristik akuntansi pemerintahan berbeda dengan Akuntansi bisnis, perbedaannya seperti :

1. Dalam akuntansi pemerintahan tidak ada laporan laba.
2. Pemerintahan membutuhkan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Akuntansi pemerintahan bisa menggunakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
5. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku, karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.
6. Didalam akuntansi pemerintahan tidak ada perkiraan modal dan laba ditahan dalam neraca.

## **Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah**

Ratmono (2017:56), Akuntansi Keuangan Daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari Pemerintah Republik Maumere yang mereformasi berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif yaitu mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan kesimpulan yang jelas dan objektif terhadap masalah yang ada.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif. Menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

#### **Waktu Penelitian**

Penelitian awal dilakukan pada Tanggal 21 Juni sampai 20 Juli 2023.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskriptif Data**

Penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka adalah untuk mengetahui proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data yang diperlukan adalah data laporan realisasi APBD pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Data diperoleh langsung dari Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

**Tabel 1.1 Laporan data realisasi APBD Tahun 2019-2021 Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Sikka**

Tahun	Laporan Anggaran	Realisasi
-------	------------------	-----------

2019	Rp.28.582.128,00	Rp.4.619.714.000
2020	Rp.238.983.707.0	Rp.2.250.761.037
2021	Rp.8.335.780.552	Rp.7.629.352.383

Sumber : Data laporan APBD kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Sikka

Berdasarkan, tabel 1.1 anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dari Tahun 2019 sampai pada tahun 2021, tersebut mengalami naik turun atau fluktuatif. Fluktuatif dapat dilihat dari realisasi APBD dari tahun 2019 ke tahun 2020 realisasi APBD mengalami penurunan sebesar Rp.2.368.952.963, dari tahun 2020 ke tahun 2021 raelisasi APBD mengalami peningkatan sebesar Rp.5.378.591.346.

### **Analisis Selisih Anggaran Pendapatan**

Analisis selisih anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi anggaran pendapatan dengan yang dianggarkan. Dalam analisis selisih anggaran pendapatan, pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila anggaran pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian.

Untuk menghitung presentase tingkat ketercapaian pendapatan :

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan tahun t}}{\text{Target Anggaran Pendapatan tahun t}} \times 100\%$$

1. Perhitungan presentase tingkat ketercapaian pendapatan tahun 2019 :

$$\begin{aligned} \text{Presentase} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan tahun 2019}}{\text{Target Anggaran Pendapatan tahun 2019}} \times 100\% \\ &= \frac{35.580.000}{100.000.000} \times 100\% \\ &= 35,58\% \end{aligned}$$

2. Perhitungan presentase tingkat ketercapaian pendapatan tahun 2020 :

$$\begin{aligned} \text{Presentase} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan tahun 2020}}{\text{Target Anggaran Pendapatan tahun 2020}} \times 100\% \\ &= \frac{22.230.000}{16.380.000} \times 100\% \\ &= 135,7\% \end{aligned}$$

3. Perhitungan presentase tingkat ketercapaian pendapatan tahun 2021 :

$$\begin{aligned} \text{Presentase} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan tahun 2021}}{\text{Target Anggaran Pendapatan tahun 2021}} \times 100\% \\ &= \frac{63.344.000}{73.750.000} \times 100\% \end{aligned}$$

= 85,89%

Dari perhitungan tersebut diatas maka dapat disajikan pada tabel 1.2 berikut :

Analisis varian/selisih Anggaran Pendapatan dapat di gambarkan sebagai kemampuan suatu pemerintahan dalam merealisasikan pendapatan, tanpa melebihi jumlah yang di anggarakan. Hasil dari perhitungan varian pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Perhitungan Varians/Selisih Anggaran Pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varian/Selisih(Rp)	Presentase
2019	Rp.100.000.000	Rp. 35.580.000	(Rp. 64.420.000)	35,58%
2020	Rp.16.380.000	Rp. 22.230.000	Rp. 5.850.000	135,7%
2021	Rp.73.750.000	Rp. 63.344.000	(Rp. 10.406.000)	85,89%

Sumber : Data Olahan Penulis

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka pada tahun 2019 sebesar (Rp.64.420.000) dengan presentase 35,58%, tahun 2020 sebesar Rp.5.850.000 dengan presentase 135%, kemudian pada tahun 2021 sebesar Rp. 10.406.000 dengan presentase 85,89%.

**Tabel 1.3 Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.**

Tahun	Total Pendapatan	Pertumbuhan (%)
2019	Rp.35.580.000	
2020	Rp.22.230.000	37,52
2021	Rp.63.344.000	184,94

Sumber : Data Diolah Penulis

Berdasarkan tabel 1.3 pertumbuhan pendapatan dapat dilihat tahun anggaran 2019-2021 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif yang disebabkan oleh adanya covid-19 yang membuat pertumbuhan pendapatan menjadi menurun. Pertumbuhan pendapatan pada tahun tahun 2020 dengan jumlah sebesar (37,52%) karena pertumbuhan pendapatannya menurun. Sedangkan, pada tahun 2021 pertumbuhan pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka peningkatannya cukup tinggi dengan jumlah sebesar 184,94%.

### **Pengukuran Efektif dan Efisien Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pengukuran Efektif**

Rasio efektif keuangan daerah otonomi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan APBD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan

efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektif menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Berikut, perhitungan Rasio Efektif dan Efisien APBD:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Target Anggaran Belanja Langsung}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisien} = \frac{\text{Target Anggaran Belanja Tidak Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung}} \times 100\%$$

1. Perhitungan Efektivitas Anggaran Belanja Langsung Tahun 2019 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Target Anggaran Belanja Langsung}} \times 100\% \\ &= \frac{4.619.478.000}{5.975.478.000} \times 100\% \\ &= 77,31\% \end{aligned}$$

2. Perhitungan Efektivitas Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Target Anggaran Belanja Langsung}} \times 100\% \\ &= \frac{2.250.761.037}{2.389.837.070} \times 100\% \\ &= 94,18\% \end{aligned}$$

3. Perhitungan Efektivitas Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Target Anggaran Belanja Langsung}} \times 100\% \\ &= \frac{7.629.352.383}{8.335.780.552} \times 100\% \\ &= 91,52\% \end{aligned}$$

Skala pengukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas Anggaran Belanja Langsung adalah (Mahmudi 2010) :

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 99% sampai dengan 91% berarti efektif.
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 90% berarti tidak efektif.

**Tabel 1.4 Pengukuran Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Langsung Tahun 2019-2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Sikka**

No	Tahun	Target	Realiasasi	Tingkat Efektivitas (%)	Kategori
1	2019	5.975.478.000	4.619.714.000	77,31%	Tidak Efektif
2	2020	2.389.837.070	2.250.761.037	94,18%	Efektif
3	2021	8.335.780.552	7.629.352.383	91,52%	Efektif

Sumber : Data Olahan Penulis



Dari tabel 1.4 hasil tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pada tahun 2019 mengalami kategori tidak efektif sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kategori efektif dengan capaian 94,18% dan 91,52%. Hal ini menunjukkan pengelolaan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka berada pada kategori “efektif” karena sesuai dengan skala pengukuran tingkat pencapaiannya yaitu 99% sampai dengan 91% berarti efektif.

### **Pengukuran Efisiensi**

Pengukuran efisiensi anggaran belanja dilakukan dengan membagi total realisasi anggaran belanja dengan biaya pengeluaran/target belanja. Tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dihitung dengan membandingkan total realisasi dengan biaya pengeluaran/target belanja yang dapat dilihat dengan rumus berikut :

1. Perhitungan Efisien Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisien} &= \frac{\text{Target Anggaran Belanja Tidak Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung}} \times 100\% \\ &= \frac{2.817.141.337}{2.644.896.613} \times 100\% \\ &= 106,5\% \end{aligned}$$

2. Perhitungan Efisien Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisien} &= \frac{\text{Target Anggaran Belanja Tidak Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung}} \times 100\% \\ &= \frac{2.725.905.195}{2.606.844.982} \times 100\% \\ &= 104,5\% \end{aligned}$$

3. Perhitungan Efisien Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2021 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisien} &= \frac{\text{Target Anggaran Belanja Tidak Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung}} \times 100\% \\ &= \frac{2.589.527.381}{2.657.242.454} \times 100\% \\ &= 97,45\% \end{aligned}$$

Skala pengukuran yang digunakan untuk menilai Efisien Anggaran Belanja Tidak Langsung adalah (Mahmudi 2010) :

1. Apabila hasilnya kurang < 20% berarti tidak efisien
2. Apabila hasilnya antara 21% sampai dengan 85% berarti efisien
3. Apabila hasilnya > 85% berarti tidak efisien

**Tabel 1.5 Pengukuran Tingkat Efisien Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2019-2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.**

No	Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Efisiensi (%)	Kriteria
1	2019	2.817.141.337	2.644.896.613	106,5%	Kurang Efisien

2	2020	2.725.905.195	2.606.844.982	104,5%	Kurang Efisien
3	2021	2.589.527.381	2.657.242.454	97,45%	Kurang Efisien

Sumber : Data Olahan Penulis

Dari tabel 1.5 hasil tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat efisien tahun 2019 dan 2020 mengalami kategori Kurang efisien dengan capaian 106,5% dan 104,5%. Sedangkan, pada tahun 2021 dengan capaian 97,45% dinyatakan kurang efisien. Hal ini menunjukkan pengelolaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berada pada kategori “kurang efisien” karena sesuai dengan skala pengukuran yaitu apabila hasilnya >85% berarti kurang efisien.

### **Analisis Kecerasan**

Analisis ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana, maka porsi untuk ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Berikut, perhitungan rasio keserasian belanja operasi terhadap total belanja sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio belanja operasi terhadap total belanja (2019)} &= \frac{\text{realisasi belanja operasi}}{\text{total belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{2.844.178.00}{826.216.891} \times 100\% \\ &= 34,42\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio belanja operasi terhadap total belanja (2020)} &= \frac{\text{realisasi belanja operasi}}{\text{total belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{1.264.213.750}{949.540.803} \times 100\% \\ &= 13,31\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio belanja operasi terhadap total belanja (2021)} &= \frac{\text{realisasi belanja operasi}}{\text{total belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{1.817.100.748}{915.253.507} \times 100\% \\ &= 196,5\% \end{aligned}$$

Berikut, perhitungan rasio keserasian belanja modal terhadap total belanja sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Belanja modal terhadap total belanja (2019)} &= \frac{\text{realisasi belanja modal}}{\text{total belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{1.691.394.080}{826.216.891} \times 100\% \\ &= 204,7\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Belanja modal terhadap total belanja (2020)} &= \frac{\text{realisasi belanja modal}}{\text{total belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{844.527.320}{949.540.803} \times 100\% \\ &= 88,94\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Belanja modal terhadap total belanja (2021)} &= \frac{\text{realisasi belanja modal}}{\text{total belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{3.147.071.000}{915.253.507} \times 100\% \\ &= 3,438\% \end{aligned}$$

Berikut, perhitungan rasio keserasian belanja langsung terhadap total belanja sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Belanja langsung terhadap total belanja (2019)} &= \frac{\text{realisasi belanja langsung}}{\text{total belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{4.619.714.00}{826.216.891} \times 100\% \\ &= 559,1\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Belanja langsung terhadap total belanja (2020)} &= \frac{\text{realisasi belanja langsung}}{\text{total belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{2.250.761.037}{949.540.803} \times 100\% \\ &= 237,0\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Belanja langsung terhadap total belanja (2021)} &= \frac{\text{realisasi belanja langsung}}{\text{total belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{7.629.352.383}{915.253.507} \times 100\% \\ &= 833,5\% \end{aligned}$$

**Tabel 1.6 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.**

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90 %	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri Nomor : 690.900.327.1994

Dari tabel 1.6 hasil tabel diatas menunjukkan bahwa :

1. Rasio keserasian belanja operasi terhadap total belanja pada tahun 2019 sebesar 34,42% dengan kriteria “tidak efektif”, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 13,31% dengan kriteria “tidak efektif”, dan pada tahun 2021 sebesar 196,5% dengan kriteria “Sangat efektif”.
2. Rasio keserasian belanja modal terhadap total belanja pada tahun 2019 sebesar 204,7% dengan kriteria “sangat efektif”, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 88,94% dengan kriteria “cukup efektif”, dan pada tahun 2021 sebesar 3,438% dengan kriteria “tidak efektif”.

3. Rasio keserasian belanja langsung terhadap total belanja pada tahun 2019 sebesar 559,1% dengan kriteria “tidak efektif”, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 237,0% dengan kriteria “tidak efektif”, dan pada tahun 2021 sebesar 833,5% dengan kriteria “cukup efektif”.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, terkait dengan tingkat Efektivitas dan Efisien Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) beserta dengan pelaksanaannya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa Pertumbuhan pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka tingkat efisien tahun 2019 dan 2020 mengalami kategori tidak efisien dengan capaian 35,58% dan 135,7%. Sedangkan, tingkat efisien pada tahun 2021 dengan capaian 85,89%. Hal ini menunjukkan pengelolaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengalami pertumbuhan belanja mengalami penurunan, berada pada kategori (kurang efisien) karena sesuai dengan skala pengukuran yaitu apabila hasilnya >85% berarti kurang efisien.
2. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa, tingkat efektivitas tahun 2019 kategori efektif dengan capaian 77,31%, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kategori efektif dengan capaian 94,18% dan 91,52%. Hal ini menunjukkan pengelolaan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka berada pada kategori “efektif” karena sesuai dengan skala pengukuran tingkat pencapaiannya yaitu 99% sampai dengan 91% berarti efektif.
3. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa, tingkat efisien tahun 2019 dan 2020 mengalami kategori kurang efisien dengan capaian 106,5% dan 104,5%. Sedangkan, tingkat efisien pada tahun 2021 dengan capaian 97,45%. Hal ini menunjukkan pengelolaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berada pada kategori “kurang efisien” karena sesuai dengan skala pengukuran yaitu apabila hasilnya >85% berarti kurang efisien.
4. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa, rasio keserasian belanja operasi menunjukkan rasio belanja operasi terhadap total belanja tahun 2019-2021 yaitu peningkatan rasio yang signifikan dengan rasio tertinggi pada tahun 2021 sebesar 343,8% dengan tidak efektif dan rasio terendah pada tahun 2020 sebesar 13,31% dengan kriteria tidak efektif.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan sebelumnya. Beberapa saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka :

1. Dalam perhitungan tingkat efektivitas dan efisien Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, sebaiknya dianalisa secara tepat agar perhitungan data realisasi anggarannya menjadi tepat dan anggaran yang sudah disusun diharapkan dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan. Dan diharapkan agar dapat meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang dan lebih teliti lagi dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing.
2. Agar semakin meningkatkan kinerja dalam mengelola anggaran belanja daerah secara khusus dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara umum. Dengan kinerja yang baik maka efisiensi belanja juga semakin baik. Terutama dalam meningkatkan kinerja anggaran agar optimalisasi yang diinginkan segera terlaksana sesuai dengan visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.

## **Keterbatasan Penelitian**

1. Pengambilan data hanya dilakukan berdasarkan perhitungan satu sumber saja yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.
2. Penelitian ini hanya menggambarkan secara umum tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Daling, Marcheno. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal EMBA. Vol 1No.3.
- David, 2010. *Pengertian Teori Stewardship*
- Dien, A. N. J., Tinangon, J., & Stanley, (2015). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*. Jurnal EMBA.
- Dwi Ratmono, 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual.*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Firmansyah, (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Hasanah, Nurmalia dan Achmad Fauzi, 2017. *Akuntansi Pemerintah*. Bogor: In Media.
- Moleong, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Muindro Renyowijoyo, 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Mentu dan Sondakh, 2016. *Pengertian Akuntansi Pemerintahan*.

Tenda, M.V.S. Mirki, H. Sabijono,. V.Z. Tirayoh. 2014. *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2010-2012*. Jurnal EMBA. Vol.2 No.1.